



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN ANGGARAN 2026



**DINAS TENAGA KERJA DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR
2025**



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 September 2025


WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 September 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
3. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2026
4. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
5. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
6. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
9. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
13. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026
16. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
17. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026
18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
19. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
20. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
21. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
22. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
23. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
24. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
25. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2026

26. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
27. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
28. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
29. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
30. RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
31. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
32. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
33. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2026
34. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
35. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
36. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugrahaNya, maka penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun anggaran 2026 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan program/kegiatan serta sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya.

Kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar masih perlu penyempurnaan oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan Rencana Akhir Rencana Kerja ini.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja ini bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan sehingga tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Denpasar, 4 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar



I Putu Sandika S.E., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680306 20000 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (<i>jika ada</i>).....	36
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	46
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	58
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	67
BAB V	
PENUTUP	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik di bandingkan keadaan sebelumnya. Salah satu proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi Sumber Daya Manusia. Optimalisasi Sumber Daya Manusia mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki nilai kemanfaatan yang lebih bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan pembangunan yang dilakukan secara bertahap mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan melalui program dan kegiatan. Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Denpasar yaitu :

Visi : "KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Sebagai dokumen rencana tahunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dapat mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3465);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025–2045;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dimaksud untuk mempertegas arah program dan kegiatan tahun 2026 yang akan dilakukan dalam rangka mengisi pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan di kota Denpasar. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi diharapkan nantinya tujuan dari program/kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan visi misi sebagaimana yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menjadi tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (*jika ada*)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja merupakan sebuah tuntutan yang berdampak pada penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab hingga akhir tahun 2024. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran.

Dalam Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan program dan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa rasionalisasi / pergeseran kegiatan yang telah ditetapkan yang mana hal tersebut harus dirasionalisasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dibidang ketenagakerjaan, dimana pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi memiliki **4 Program, 15 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan** dengan anggaran sebesar **Rp.10.572.554.973,-**.

Target :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Belanja Operaasi | Rp. 11.970.290.592,-. |
| 2. Belanja Modal | Rp. 252.000.000,-. |
| 3. Total belanja operasi dan belanja modal | Rp. 12.222.290.592,-. |

Realisasi Tahun 2024 :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Belanja Modal | Rp. 10.329.404.973,-. |
| 2. Belanja Modal | Rp. 243.150.000,-. |
| 3. Total belanja operasi dan belanja modal | Rp. 10.572.554.973,-. |

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan target belum dapat dipenuhi sesuai dengan yang direncanakan.

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Meningkatnya penempatan tenaga kerja
- Meningkatnya tenaga kerja yang berkompeten dan tersertifikasi
- Terciptanya hubungan industrial yang harmonis

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Untuk Anggaran Tahun 2024 tidak ada Implikasi yang timbul.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalah adalah :

- Menyelenggarakan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi
- Meningkatkan mutu pelayanan Informasi Pasar Kerja
- Meningkatkan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab hingga akhir tahun 2024.

Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan Indikator Kinerja Utama (Tingkat Pengangguran Terbuka) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80	2,11	124% (SANGAT TINGGI)

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tingkat pengangguran menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 jumlah pengangguran di Kota Denpasar sebesar 8.852 orang dan Jumlah angkatan kerja sebanyak 419.894 orang sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar :

$$TPT = \frac{8.852 \text{ orang}}{419.894 \text{ orang}} \times 100\% = 2,11\%$$

Pada tahun 2024 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 2,80% dan pada tahun 2024 sebesar 2,11% sehingga dapat dilihat bahwa Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 124% dengan predikat **SANGAT TINGGI**.

Untuk mendukung tercapainya target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Peraturan Menteri ini Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah mengenai perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut sesuai dengan SPM Ketenagakerjaan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN WAJIB : PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO.	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>Etenaga kerja yang dilatih</u> Ependaftar pelatihan berbasis kompetensi x 100%
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan Kewirausahaan	60%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>Etenaga kerja yang dilatih</u> Ependaftar pelatihan kewirausahaan x 100%
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>Ependaftar pencari kerja yang ditempatkan</u> Ependaftar pencari kerja yang terdaftar x 100%

NO.	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	Dinas Prov. Dinas Kab/Kota	$\frac{\text{Ekasus yang diselesaikan dengan PB}}{\text{Ekasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif	50%	2016	Dinas Prov. Dinas Kab/Kota	$\frac{\text{Epekerja/buruh peserta jamsostek aktif}}{\text{Epekerja/buruh}} \times 100\%$
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	Dinas Prov. Dinas Kab/Kota	$\frac{\text{EPerusahaan yang telah diperiksa}}{\text{Eperusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$
		2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	Dinas Prov. Dinas Kab/Kota	$\frac{\text{Eperalatan yang telah diuji}}{\text{Eperalatan yang terdaftar}} \times 100\%$

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2014
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2024 sebagai berikut :

Penjabaran yang mendukung capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2024 sebagai berikut :

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan indikator :

1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi tahun 2024 dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 112% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Pada Indikator Kinerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan uji kompetensi pada Tahun 2024 sebanyak 6.956 orang dan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 6.956 orang.
2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan dengan realisasi 95% dan tingkat capaian 102% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Pada Indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan jumlah

tenaga kerja yang dilatih sebanyak 251 orang dan jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 265 orang. Pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan meliputi pelatihan dan uji kompetensi bahasa Inggris, barista, digital marketing, tata rias, dan pastry sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan mencapai 95%. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan berkompoten sehingga mampu berkompetisi dengan baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja telah dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 3 Kegiatan yakni :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta berperan penting dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja di Kota Denpasar. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja di LPKS. Jumlah LPKS di Kota Denpasar s/d Desember 2024 berjumlah 70 LPKS.

TUJUAN Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) :

1. Melakukan pengawasan pada perizinan berusaha berbasis resiko pada bidang ketenagakerjaan (LPKS) pada sistem OSS. RBA
2. Melaksanakan visitasi, verifikasi dan rekomendasi terkait permohonan sertifikat standar (Izin operasional LPKS pada sistem OSS.RBA)
3. Memfasilitasi usulan akreditasi LPKS
4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan kredibilitas LPKS
5. Terlaksananya program pelatihan berbasis kompetensi
6. Meningkatkan kompetensi Instruktur di LPKS

7. Meningkatkan sertifikasi kompetensi peserta latih pada LPKS
8. Membantu LPKS menjalin kerja sama dengan industri

Pada kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini untuk mengukur produktivitas suatu daerah. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara/bimbingan konsultasi, monitoring, dan evaluasi. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan manajemen. Dinas Tenaga Kerja sampai dengan desember 2024 telah melakukan pengukuran produktivitas pada lembaga/perusahaan sebesar 60 Lembaga/perusahaan.

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator :

1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan pada tahun 2024 dengan realisasi 65% dan Tingkat capaian 176% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Tabel 2.2
Indikator Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan Tahun 2024

Uraian	Sumber Data	Terdaftar	Ditempatkan
Mengukur Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Denpasar	Data BKOL	644	303
	Data PMI	1.033	1.033
	Data Disabilitas	93	52
	Data TKM	70	70
	Data BKK / Tracing Study	948	354
	Jumlah TK Ditempatkan		2.788
		65%	

Berdasarkan Database ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sampai dengan bulan desember 2024 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 2.788 orang dan pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan sebanyak 1.812 orang sehingga persentase penempatan pada tahun 2024 sebesar 65%. Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja telah dilaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 4 Kegiatan Pendukung yakni :

Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pelayanan antarkerja di Daerah Kab/Kota
2. Pengelolaan informasi pasar kerja
3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota, Tujuan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/kota adalah untuk mewujudkan kesempatan dan hak yang sama bagi pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan perlindungan PMI yang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan

sehingga menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sampai dengan Desember 2024 tercatat pekerja migran Indonesia di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi kompetensi sebanyak 634 orang.

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, pada kegiatan ini melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan dan penilaian terhadap proses pemantauan tenaga kerja asing di Kota Denpasar. Monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing dilakukan untuk memberikan saran dan rekomendasi agar mentaati aturan yang berlaku. Evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan pemantauan tenaga kerja asing di Kota Denpasar, pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 50 perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing di Kota Denpasar.

Target Pendapatan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 7.151.187.380.00 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial dengan indikator :

1. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2024 dengan realisasi 56% dan Tingkat capaian 89% mendapatkan predikat **Tinggi**.

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi dan peranan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, sosialisasi ketenagakerjaan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran

peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis yang ada di perusahaan serta kerja sama yang baik antara pekerja dengan pengusaha sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pada indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Adanya kasus Hubungan Industrial menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan. Pada tahun 2024 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menerima 16 kasus yang tercatat dan yang sudah dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 9 kasus, sehingga apabila dipersentasekan target capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mencapai 56%. namun dalam mediasi kasus hubungan industrial selain penyelesaian melalui Perjanjian Bersama dapat juga diselesaikan dengan anjuran, pada tahun 2024 Mediator telah menyelesaikan kasus secara anjuran sebanyak 7 kasus.

2. Pada Besaran Pekerja/buruh yang menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2024 dengan realisasi 52% dan Tingkat capaian 85% mendapatkan predikat **Tinggi**.

Sehubungan dengan pencapaian pada Triwulan IV Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2024

Segmen	Jumlah Tenaga Kerja	Sudah Terlindungi	Potensi Belum Terlindungi	Persentase Sudah Terlindungi	Persentase Belum Terlindungi
Penerima Upah (PU)	276,736	170,090	106,646	61.46%	38.54%
Bukan Penerima Upah (BPU)	145,646	49,683	95,963	34.11%	65.89%
Cakupan Perlindungan Sektor PU dan BPU	422,382	219,773	202,609	52.03%	47.97%

Sumber data Jumlah Tenaga Kerja : : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023

Secara keseluruhan, Tenaga Kerja di Kota Denpasar sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 52% dan yang belum terlindungi sebesar 48%. Jumlah peserta

jamsostek aktif di Kota Denpasar sebanyak pada Tahun 2024 sebanyak 219.773 orang dan jumlah seluruh pekerja sebanyak 422.382 orang sehingga Besarannya Pekerja/Buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 52% Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial dengan 2 Kegiatan Pendukung :

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024	
1.	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih $\times 100$ Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi		87%	88%	89%	90%	90%	55%	100%	100%	100%	
2.	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih $\times 100$ Pendaftar Pelatihan Berbasis Kewirausahaan		88%	91%	93%	96%	99%	77%	95%	100%	100%	

3.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$		35%	36%	37%	38%	39%	54%	65%	100%	100%	
4.	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan PB}}{\text{Jumlah Kasus yang dicatatkan}} \times 100$		60%	61%	63%	65%	67%	39%	56%	100%	100%	
5.	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah pekerja / buruh peserta jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja / buruh}} \times 100$		57%	59%	61%	63%	64%	56%	52%	100%	100%	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu Strategis Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Analisis isu-isu strategis merupakan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang akan dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, identifikasi permasalahan dan isu strategis merupakan hal yang penting dilakukan. Rumusan permasalahan dan isu strategis merupakan dasar penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara kebutuhan dan pelaksanaan program atau kegiatan. Berikut teknik menyimpulkan isu strategis :

Tabel. 2.5
Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD		Isu strategis PD
			Global/Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mengurangi pengangguran	Masih banyaknya pencari kerja/ tenaga kerja yang belum berkompeten dan tersertifikasi	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya <i>mismatch</i> antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	pencari kerja/tenaga kerja yang belum berkompeten dan tersertifikasi
	Belum link dan matchnya antara lowongan yang tersedia dengan kompetensi pencari kerja		Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja		Link dan Matchnya antara lowongan yang tersedia dengan kompetensi pencari kerja
	Hubungan industrial yang belum harmonis dan perlindungan tenaga kerja yang belum memadai	Penyelenggaraan perlindungan sosial belum optimal.	Tidak ada kecocokkan upah, karena tidak semua perusahaan mampu dan bersedia mempekerjakan seorang pelamar dengan tingkat upah yang diminta pelamar.		Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

2.3.2 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian proram

Sebagian tenaga kerja belum berkompeten/tersertifikasi sehingga tidak ada kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kompetensi tenaga kerja.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Faktor penentu keberhasilan merupakan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan menganalisis faktor tantangan dan peluang dalam menjalankan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Masih banyaknya pencari kerja/tenaga kerja yang belum berkompeten dan tersertifikasi
2. Belum Link dan Matchnya antara lowongan kerja yang tersedia dengan kompetensi tenaga kerja
3. Kurangnya pemahaman tentang sarana Hubungan Industrial mengakibatkan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja/jaminan sosial.

b. Peluang

1. Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja/tenaga kerja yang berkompeten dan tersertifikasi
2. Meningkatnya informasi pasar kerja bagi pencari kerja
3. Terjalannya hubungan industrial yang harmonis dan tenaga kerja sepenuhnya *tercovered* dalam jaminan sosial ketenagakerjaan

2.3.4 Formulasi isu-isu penting yang strategis dalam perumusan program prioritas yang direncanakan pada tahun 2026

Formulasi isu-isu penting yang strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program prioritas yang direncanakan pada tahun 2026 adalah

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Program peningkatan kesempatan kerja
3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses

pelaksanaannya.

Tabel 2.4
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Denpasar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	12.539.350.024	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	11.411.755.191	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Sesuai Dengan Peraturan san Perundangan yang Berlaku	56 Orang	8.378.899.987	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	8.378.899.987	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	8.378.899.987	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	8.378.899.987	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah perusahaan pengguna TKA termonitoring	50 Perusahaan	27.300.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah perusahaan pengguna TKA termonitoring	50 Perusahaan	27.300.000	

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Denpasar	Jumlah TKA yang Mendapatkan Pengesahan RPTKA	1 Laporan	27.300.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Denpasar	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 Laporan	27.300.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100%	186.585.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	186.585.100	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.808.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.808.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	32.999.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	32.999.000	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	18.398.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	18.398.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	72.566.100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	72.566.100	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.100.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	41.714.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	41.714.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai	100%	29.241.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai	100%	29.241.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	6.600.000	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	6.600.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	22.641.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	22.641.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.326.067.104	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.326.067.104	
Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	288.823.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	288.823.000	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	144.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	144.000.000	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	153.393.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	153.393.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.739.851.104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1.739.851.104	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	463.662.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase barang milik daerah siap pakai	100%	463.662.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	284.860.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	21 Unit	284.860.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	11.966.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	11.966.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	258.825.199	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	63.680.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	-	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	99.656.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2 Unit	99.656.000	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.500.000	
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	90.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	90.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Denpasar	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	90.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Denpasar	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	90.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Denpasar	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Denpasar	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	90.000.000	

3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	89%	287.592.600	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	90%	287.592.600	
			Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	93%							
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi	510 Orang	179.180.000	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Denpasar	Jumlah pencari kerja yang dilatih	510 Orang	179.180.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	179.180.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	179.180.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pentingnya Produktivitas di LPKS Dan Perusahaan	25%	31.457.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Produktivitas Perusahaan	25%	28.282.000	

	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	31.457.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	28.282.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Denpasar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70 LPKS	129.533.600	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Denpasar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	3 LPKS	80.130.600	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Denpasar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 LPKS	129.533.600	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Denpasar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70 LPKS	80.130.600	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	37%	785.358.200	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Denpasar	Persentase kesempatan/ lowongan kerja yang terpenuhi	40%	817.027.500	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Denpasar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4 Dokumen	531.588.700	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Denpasar	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	3.500 Orang	567.250.500	
			Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	200 Orang							

Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Kota Denpasar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	600 Orang	236.457.500	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Denpasar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	600 Orang	288.122.500	
Job Fair/Bursa Kerja	Kota Denpasar	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	295.131.200	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Denpasar	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	279.128.000	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Unit Layanan Disabilitas	20 Orang	239.237.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	20%	239.134.500	
		Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	37%							
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	16.382.500	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	14.118.000	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencaker	Kota Denpasar	Jumlah Pencaker yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	22.322.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencaker	Kota Denpasar	Jumlah Pencaker yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	700 Orang	25.011.500	

Pelayanan antar kerja	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	200.532.500	Pelayanan antar kerja	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	300 Orang	200.005.000	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Terlindunginya PMI (Pra dan Purna)	60 Orang	14.532.500	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia yang tersosialisasi	20%	10.642.500	
		Terlaksananya Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	37%							
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Denpasar	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang	14.532.500	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Denpasar	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang	10.642.500	

5	Program Hubungan Industrial	Kota Denpasar	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	63%	716.492.000	Program Hubungan Industrial	Kota Denpasar	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10%	502.480.000	
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	61%							
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	404.480.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial	160 Perusahaan	175.640.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Kota Denpasar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	404.480.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Kota Denpasar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	175.640.000	

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 Perusahaan	312.012.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/anjuran	20 Perkara	326.840.000	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara							
		Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan	35 Perkara							
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Kota Denpasar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara	172.454.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	138.530.000	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Kota Denpasar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	55 Asosiasi dan Serikat Pekerja	139.558.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Kota Denpasar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	188.310.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yaitu :

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan di bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

B. FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dari tugas pokok dan fungsi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran A. VII Memuat Tentang Kode dan Daftar Pogram Kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas maka usulan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dapat disajikan dalam tabel 2.9 berikut :

Tabel. 2.7

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Denpasar
Dinas Tenaga Kerja dan Serifikasi Kompetensi Kota Denpasar**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
	Urusan : Ketenagakerjaan				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah perusahaan pengguna TKA termonitoring	50 Perusahaan	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	50 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	
	Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai	100%	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah siap pakai	100%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2 Unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
	Pemeliharaan Aset Tak Terwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	

2	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	90%	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang dilatih	60 Orang	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	3 LPKS	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swastayang Dibina	70 LPKS	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Produktivitas Perusahaan	25%	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	

4	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase kesempatan/lowongan kerja yang terpenuhi	40%	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	3.500 Orang	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	600 Orang	
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 Orang	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	20%	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	
	Penyuluhan dan bimbingan Jabatan bagi Pencaker		Jumlah pencaker yang mendapatkan Penyuluhan dan bimbingan Jabatan	700 Orang	
	Pelayanan antar kerja		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	300 Orang	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia yang tersosialisasi	20%	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang	

5	Program Hubungan Industrial		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10%	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial	160 Perusahaan	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/anjuran	20 Perkara	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	20 Perkara	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2025-2029, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kota Denpasar.

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik, dapat dilakukan dalam jangka pendek dan memberi arah serta dasar yang jelas bagi organisasi. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran harus menyatakan apa yang ingin dicapai suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Sasaran bersifat operasional dengan periode waktu dan target yang lebih spesifik.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Dalam rangka mendukung tercapainya **MISI ke 4** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yaitu **“Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana”** dengan **Tujuan “Meningkatnya Daya Saing Daerah”** dan **Sasaran “Berkurangnya Pengangguran”**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan tujuan untuk Tahun 2025-2029 yaitu: **“Mengurangi Pengangguran”**. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pencari kerja bersertifikat kompetensi

2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja

Hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar beserta indikator sasaran jangka menengah disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Tahunan						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mengurangi Pengangguran	Mengurangi Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka								
		Meningkatnya pencari kerja bersertifikat kompetensi	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	65%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	56%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
			Persentase pekerja buruh yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	52%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, sub kegiatan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan dalam mendukung Pembangunan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah merumuskan dalam bentuk program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Urusan : Ketenagakerjaan								11.804.135.283
2	07	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Kota Denpasar	100%	9.910.475.476			100%	10.901.523.023
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	56 Orang	7.819.130.856			52 Orang	8.601.043.941
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	56 Orang/Bulan	7.819.130.856			52 Orang/Bulan	8.601.043.941

2	07	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah perusahaan pengguna TKA termonitoring	Kota Denpasar	50 Perusahaan	26.500.000			50 Orang	29.150.000
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Kota Denpasar	1 Laporan	26.500.000			1 Laporan	29.150.000
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum	Kota Denpasar	100%	147.841.000			100%	162.625.100
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	6.808.000			1 Paket	7.488.800
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Denpasar	3 Paket	25.577.000			3 Paket	28.134.700
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Denpasar	2 Paket	18.398.000			2 Paket	20.237.800

				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	38.169.000			1 Paket	41.985.900
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	1 Laporan	12.000.000			1 Laporan	13.200.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	1 Laporan	23.874.000			1 Laporan	26.261.400
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai	Kota Denpasar	100%	-			100%	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Denpasar	1 Unit	-			1 Unit	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Unit	-			12 Unit	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Unit	-			-	-

2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Denpasar	100%	881.468.488			100%	969.615.336
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat menyurat	Kota Denpasar	1 Laporan	230.040.000			1 Laporan	253.044.000
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kota Denpasar	1 Laporan	144.000.000			1 Laporan	158.400.000
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Denpasar	1 Laporan	145.057.000			1 Laporan	159.562.700
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Denpasar	1 Laporan	362.371.488			1 Laporan	398.608.636

2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai	Kota Denpasar	100%	430.376.000			100%	473.413.600
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Denpasar	18 Unit	257.860.000			21 Unit	283.635.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Denpasar	1 Unit	-			1 Unit	-
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Denpasar	18 Unit	63.680.000			5 Unit	70.048.000
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Denpasar	2 Unit	105.336.000			2 Unit	115.869.600

				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Denpasar	2 Unit	3.500.000			2 Unit	3.850.000
				Pemeliharaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Denpasar	2 Unit	-			-	-
2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Kota Denpasar	100%	90.000.000			100%	99.000.000
2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Kota Denpasar	100%	90.000.000			100%	99.000.000
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja maskro	Kota Denpasar	1 Dokumen	90.000.000			1 Dokumen	99.000.000
2	07	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Kota Denpasar	90%	46.852.600			90%	51.537.860
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Kota Denpasar	40 Orang	1.094.000			60 Orang	1.203.400

				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Denpasar	40 Orang	1.094.000			60 Orang	1.203.400
2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Produktivitas Perusahaan	Kota Denpasar	25%	19.601.000			25%	21.561.100
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Denpasar	2 Dokumen	19.601.000			2 Dokumen	21.561.100
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	Kota Denpasar	3 LPKS	26.157.600			3 LPKS	28.773.360
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Denpasar	70 LPKS	26.157.600			70 LPKS	28.773.360

2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase kesempatan/lowongan kerja yang terpenuhi	Kota Denpasar	40%	521.861.000			40%	574.047.100
2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	Kota Denpasar	3.500 Orang	286.141.000			3.500 Orang	314.755.100
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Denpasar	600 Orang	286.141.000			600 Orang	314.755.100
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Denpasar	500 Orang	-			500 Orang	-
2	07	04	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	Kota Denpasar	20%	225.262.000			20%	247.788.200
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Denpasar	25 Orang	12.487.000			25 Orang	13.735.700

				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencaker	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Denpasar	700 Orang	24.173.000			700 Orang	26.590.300
				Pelayanan antar kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Kota Denpasar	300 Orang	188.602.000			300 Orang	207.462.200
2	07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia yang tersosialisasi	Kota Denpasar	20%	10.458.000			20%	11.503.800
				Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	Kota Denpasar	350 Orang	10.458.000			350 Orang	11.503.800

2	07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Kota Denpasar	10%	447.984.000			10%	492.782.400
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial	Kota Denpasar	160 Perusahaan	259.700.000			160 Perusahaan	285.670.000
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Denpasar	5 Laporan	259.700.000			5 Laporan	285.670.000
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/anjuran	Kota Denpasar	20 Perkara	188.284.000			20 Perkara	207.112.400

				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Denpasar	20 Perkara	-			20 Perkara	-
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Denpasar	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	188.284.000			24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	207.112.400

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan permendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu pada masing-masing bidang untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dengan adanya program/kegiatan/subkegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Periode Tahun 2025–2029.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Hubungan Industrial

Kegiatan :

1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dari 5 Program dan 15 Kegiatan diatas dapat disajikan dalam tabel 4.1 Berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Urusan : Ketenagakerjaan			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9.910.475.476
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	8.378.899.988
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	8.378.899.988
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah perusahaan pengguna TKA termonitoring	50 Perusahaan	26.500.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	50 Laporan	26.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	147.841.000

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.808.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	25.577.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	18.398.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	61.184.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.000.000
	Penyelenggaraan rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	23.874.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai	100%	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	926.868.488
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	240.440.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	144.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	145.057.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	397.371.488
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai	100%	430.366.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharadan dibayarkan pajaknya	21 Unit	257.850.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	-
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	63.680.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	105.336.000

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.500.000
	Pemeliharaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	-
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%	90.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	90.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	90.000.000
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	90%	46.852.600
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	60 Orang	1.094.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	1.094.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	3 LPKS	26.157.600
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	70 LPKS	26.157.600

	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Produktivitas Perusahaan	25%	19.601.000
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	19.601.000
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase kesempatan/lowongan kerja yang terpenuhi	40%	235.720.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	3.500 Orang	-
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	600 Orang	-
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui JobFair/Bursa Kerja	500 Orang	-
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	20%	225.262.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	12.487.000
	Penyuluhan dan bimbingan Jabatan bagi Pencaker	Jumlah pencaker yang mendapatkan Penyuluhan dan bimbingan Jabatan	700 Orang	24.173.000
	Pelayanan antar kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	300 Orang	188.602.000

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia yang tersosialisasi	20%	10.458.000
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	350 Orang	10.458.000
5	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10%	447.984.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial	160 Perusahaan	259.700.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	259.700.000

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/anjuran	20 Perkara	188.284.000
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	-
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	188.284.000

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada bagian ini disajikan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 7.2 Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Tiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2.	Persentase tenaga kerja yang terserap	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
3.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
4.	Persentase pekerja buruh yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Strategis atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sedangkan elemen anggaran kinerja meliputi visi, misi, tujuan sasaran program dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka terjemahannya adalah sebagai berikut : tujuan dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran yang lebih terukur, sasaran diterjemahkan kedalam program, program diimplementasikan dalam kegiatan dengan output yang terukur.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Denpasar pada yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Tiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
3.	Persentase tenaga kerja yang terserap	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Agar program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan berbagai hambatan dan kendala, mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan yang lebih optimal, seyogyanya mendapatkan perhatian dan prioritas yang baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pendanaan yang memadai. Disamping itu program dan kegiatan ini harus menitik beratkan pada pelayanan kepada masyarakat secara langsung di bidang program kegiatan non pelayanan dasar.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar di Bidang Ketenagakerjaan, serta mampu memberikan kinerja yang lebih optimal.

Sekian dan Terimakasih

Denpasar, 4 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar



I Putu Sandika S.E, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680306 20000 1 007

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.





ပဏ်တီၢ်တူၢ်တၢ်တၢ်တၢ်တၢ်
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 မိၤတၢ်
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
 တၢ်
 Jalan Gatot Subroto VI J / 32 Denpasar - Bali Telp. (0361) 9075666 / 9075751

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Renja
 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
 Kota Denpasar Tahun 2026

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPД kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	✓			

Denpasar, 15 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi



I Putu Sandika S.E., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680306 20000 1 007



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.4/2042/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2026;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketenagakerjaan.
 - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2026;
 - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2026; dan
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2024

an. Walikota Denpasar,
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar



drh. Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 196711131993032006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth :
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
 7. Tim Penyusun Renja
 8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2024
NOMOR : 188.45/2042/HK/2024
TENTANG : PEMEBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA
KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026

- Penasihat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota
Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga
Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja
dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
4. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
5. Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas
Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
6. Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli
Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar :
- Nyoman Sri Udayani, SH., MH
- Ida Ayu Mirah Setiawati, SE, M.A.P
7. Kelompok Jabatan Fungsioal Mediator Hubungan
Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar :
- I Wayan Sarjana, SH

8. Staff Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar :

- I Nyoman Budhi Andriyana, SE
- Theresia Vocci Monica Lou Lodjor, S.IP
- Deliva Fajar Arum, A.Md.Ak

an. Walikota Denpasar
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



Drs. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 196711131993032006